

Media Cetak	Suara merdeka
Tanggal	05 Juni 2024
Wilayah	Kabupaten Klaten



## Program Jaminan Kesehatan Warga Miskin Dianggarkan Rp 39 Milliar Halaman: 16

# Program Jaminan Kesehatan Warga Miskin Dianggarkan Rp 39 Miliar

**KLATEN** - Tahun 2024 dianggarkan dana sebesar Rp 39 miliar lebih untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Klaten. Saat ini, status Klaten yang sudah Universal Health Coverage (UHC) atau lebih dari 96 persen warganya terlindungi program jaminan kesehatan.

"Karena Klaten sudah UHC, maka bila ada warga Klaten yang sakit dan belum mempunyai Kartu BPJS Kesehatan, dia bisa langsung dilayani tanpa menunggu 14 hari," kata Wiyanto anggota Komisi 4 DPRD Klaten dari Fraksi PAN.

Hal itu diungkapkan sesuai menjadi narasumber pada acara sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar Dinas Kesehatan di ruang rapat paripurna DPRD Klaten, Jumat (31/5).

Tiga anggota Komisi 4 DPRD Klaten dihadirkan menjadi narasumber, yakni

Wiyanto, Suyatmi dan Willy Paul Rindo Rindo. Mereka menyosialisasikan isi dari Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan miskin di Kabupaten Klaten.

Keberadaan Jasa raharja dan BPJS Kesehatan sangat penting bagi warga miskin agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan bila sakit atau mengalami kecelakaan.

"Alokasi anggaran Rp 39 miliar lebih itu mencakup mereka yang tidak mampu dan belum mendapat jaminan kesehatan. Sosialisasi dilakukan biar warga mengetahuinya," ujar Wiyanto.

### Fasilitas Pelayanan

Dalam kesempatan itu, hadir juga dua narasumber yakni Anton Prasetyo dari Kantor Jasa Raharja dan Nugraheni Syarif Widiastuti

dari Kepala BPJS Kesehatan Klaten.

Anton Prasetyo memaparkan fasilitas layanan Jasa Raharja bagi warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan persyaratannya. Sedangkan BPJS Kesehatan memaparkan realisasi program JKN.

"Dari 1,29 juta penduduk Klaten, ada 1,27 juta yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun yang aktif sekitar 80 persen, sisanya statusnya nonaktif," imbuh Nugraheni.

Status non aktif disebabkan masih ada yang menunggak, atau dulu peserta JKN tapi diberhentikan dari Kemsos, atau dulu peserta JKN dari perusahaan dan sekarang sudah tidak lagi.

"Ada pula warga mampu tidak menjadi peserta JKN karena merasa mampu membayar biaya pengobatan sendiri," ungkap dia. (F5-48)